



Jateng
gayeng



RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



**KANTOR KECAMATAN SALE
KABUPATEN REMBANG**

Tim Penyusun

Kata Pengantar

Puji Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya akhirnya Renja Perubahan RKPD Kecamatan Sale Tahun 2025 telah terselesaikan. maksud disusunnya dokumen ini adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renja Perubahan RKPD Kecamatan Sale Tahun 2025 bertujuan secara umum sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Renja Perubahan RKPD Kecamatan Sale Tahun 2025 masih banyak keterbatasan dikarenakan bersifat rancangan awal sehingga dibutuhkan masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, semoga dokumen Renja Perubahan RKPD Kecamatan Sale Tahun 2025 dapat menjadi pedoman awal bagi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025 guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Camat Sale

MOH. IMRON, S.H
NIP 19750905 199603 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Gambar	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Landasan Hukum	12
C. Maksud dan Tujuan.....	13
D. Sistematika Penulisan	14
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN 1 TAHUN 2025	15
A. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
B. <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025.	24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SALE	32
A. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
B. Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025	33
BAB IV PENUTUP.....	38

Daftar Tabel

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sale dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Rembang	6
Tabel	2.2	Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025 Semester 1	21
Tabel	2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.....	29
Tabel	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Rembang	30
Tabel	2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	38
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 Kabupaten Rembang	41
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	44

Daftar Gambar

Gambar	1.1	Skema Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	6
Gambar	1.2	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

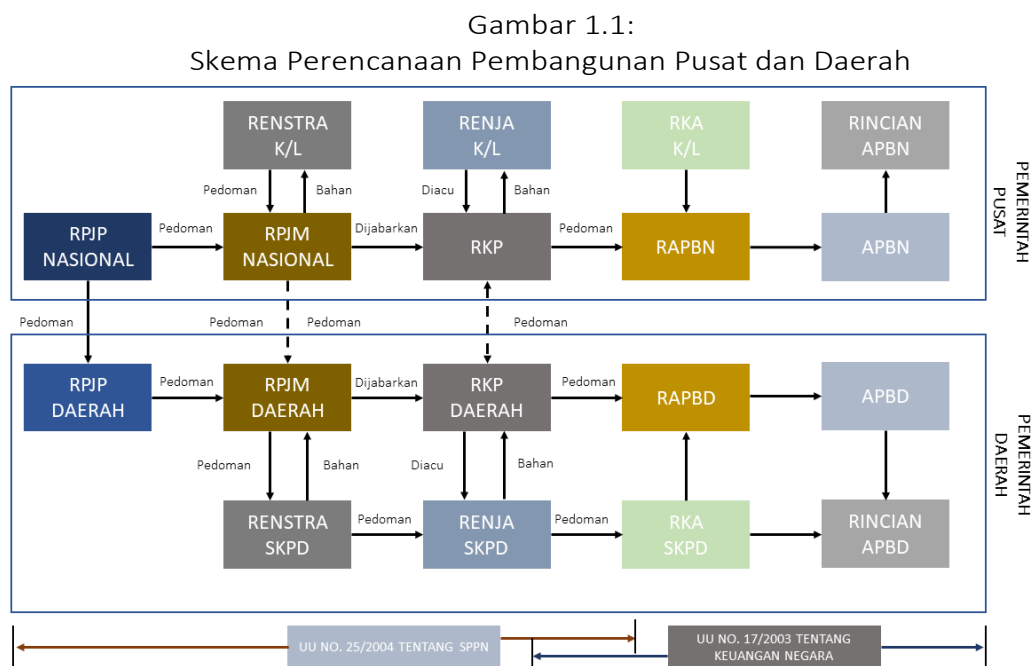
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5

(lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

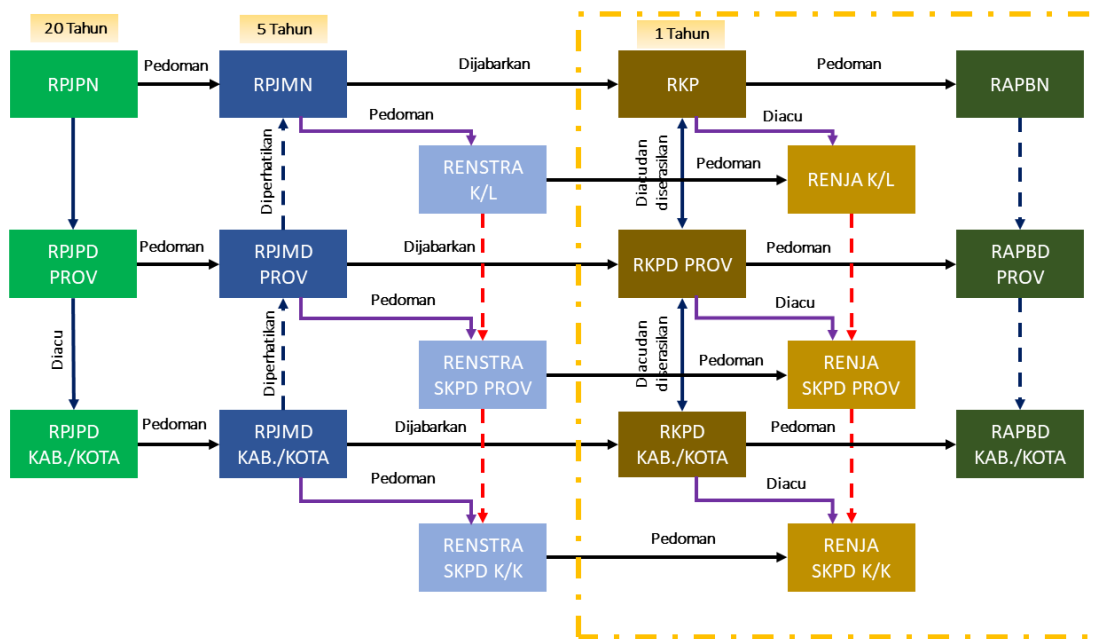
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sale Renja 2025 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Rembang dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025. Renja Kecamatan Sale Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan Renja Perubahan Kecamatan Sale dengan perencanaan pembangunan Nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.2:

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Sale, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Sale, yang menyangkut aspek:

- a. Kondisi pelayanan Kecamatan Sale;
- b. Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Sale;
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sale tahun sebelumnya;
- d. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Sale;
- e. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- f. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sale;
- g. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan

Sale;

- h. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
 - i. Rancangan awal RKPD Kabupaten Rembang tahun 2025;
 - j. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - k. Data Pokok Pembangunan Kecamatan Sale; dan
 - l. Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Sale.
2. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Sale;
- Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Sale adalah:
- a. Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Sale.
 - b. Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
 - c. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Sale untuk kondisi tahun 2021-2026;
 - d. Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
 - e. Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Sale.
3. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sale tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Sale;
- Review* hasil evaluasi mencakup :
- a. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 - b. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
 - c. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan

tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Sale. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. *Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sale dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
 - b. Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Sale tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Sale;
 - c. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Sale dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - d. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Sale sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sale;
- Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sale, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sale berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sale tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Sale Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:
- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Sale dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Sale;
 - b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Sale;
 - c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian

program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- d. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Sale;
- f. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

5. Telaahan terhadap Renja Perubahan RKPD;

Telaah terhadap Renja Perubahan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Sale. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

6. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sale yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Sale.

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi

Kecamatan Sale.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Sale. Namun dalam proses ini Kecamatan Sale mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam *desk* perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Sale terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

8. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sale dalam pembangunan daerah.

9. Penyajian dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sale;

Penyusunan dokumen renja Kecamatan Sale merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

10. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

11. Penyempurnaan Renja Kecamatan Sale;

Penyempurnaan Renja Kecamatan Sale perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

12. Pembahasan forum Perangkat Daerah;

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan Renja Kecamatan Sale dengan saran dan masukan dari tim *desk* Renja Perangkat Daerah.

13. Penyesuaian dokumen Renja Kecamatan Sale dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Kecamatan Sale yang telah didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan Forum Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Sale Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Sale Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sale untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sale.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Sale Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sale selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025 sesuai penjabaran Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Sale Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Sale Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP)

Kecamatan Sale Tahun 2025.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Sale Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sale Triwulan I Tahun 2025

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

BAB IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Agar dokumen Perubahan Rencana Kerja yang disusun berkualitas maka diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sale

Kabupaten Rembang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025 sampai dengan triwulan satu. Disajikan pula perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sampai dengan triwulan satu tahun 2025, yang sudah menyesuaikan dengan Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kaliori Triwulan I

Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Sale Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sampai dengan triwulan satu tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Kecamatan Sale telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator program maupun sasarannya, seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sale dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Rembang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW. I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10=(9/4)
7		UNSUR KEWILAYAHAN							
7.1		KECAMATAN							
7.1.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Sale	65	60	75,01	51,55	68,72%	68,72%
7.1.1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95%	95%	95%	61,10%	61,10%	61,10%
7.1.1.2.01.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	1	50%	50%
7.1.1.2.01.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	3	3	1	33%	33%
7.1.1.2.01.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100%	100%
7.1.1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	95%	95%	100%	75%	75%	75%
7.1.1.2.02.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	14	14	100%	100%
7.1.1.2.02.3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	4	1	25%	25%
7.1.1.2.02.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang disusun tepat waktu	1	1	1	1	100%	100%
7.1.1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%	95%	95%	2,80%	2,80%	2,80%
7.1.1.2.05.3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	% Dokumen Pendataan Kepegawaian yang dikelola dengan baik			17	2,80%	2,80%	2,80%
7.1.1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	95%	95%	95	2,80%	2,80%	2,80%
7.1.1.2.06.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	0	0,00%	0,00%
7.1.1.2.06.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	0	0,00%	0,00%
7.1.1.2.06.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	0	0,00%	0,00%
7.1.1.2.06.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	0	0,00%	0,00%
7.1.1.2.06.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	0	0,00%	0,00%
7.1.1.2.06.7		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1	0	0,00%	0,00%
7.1.1.2.06.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	2	17,00%	17,00%
7.1.1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	95%	95%	100%	0%	0,00%	0,00%
7.1.1.2.07.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	1	0	0,00%	0,00%
7.1.1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	95%	95%	33,00%	33,00%	33,00%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW. I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
							Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(9/4)
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	0,00%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	3	25,00%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	4	3	75,00%
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	95%	95%	95%	24,00%	24,00%
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	17	17	8	47,00%
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	7	7	0	0,00%
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	0	0	0	0	0,00%
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipihkan ke camat	95%	95%	95%	0%	0,00%
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	95%	95%	95%	0%	0,00%
					Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	1	0	0,00%
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	95%	95%	95%	0%	0,00%
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1	1	0	0
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat	100%	100%	95%	98%	63,00%
					Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	15 desa	15 desa	15	2	2	2
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu, Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	100%	95%	63,00%	63,00%
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	5	5	63,00%
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	8	8	2	25,00%
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		95%	95%	95%	0,00%	0,00%
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	% lembaga kemasyarakatan desa yang aktif		15 Desa	15 Desa	0	0
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	95%	95%	95%	33,00%	33,00%
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95%	95%	95%	33,00%	33,00%
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	3	3	1	33,00%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW. I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW. I Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(9/4)
7.1.4.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	% Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	95%	95%	95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.1.4.2.02.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	% Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	1	1	1	0	0,00%	0	0,00%
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	100%	300	0	0,00%	0	0,00%
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	100%	95%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%
7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	95%	100%	95%	20,00%	20,00%	40,00%	40,00%
7.1.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15	100%	15	3	20,00%	6	40,00%
7.1.6.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15	100%	15	3	20,00%	6	40,00%
7.1.6.2.01.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	% Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	15	100%	15	3	20,00%	6	40,00%
7.1.6.2.01.8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	% Pemenuhan jabatan Kades dan Perangkat Desa	15	100%	15	3	20,00%	6	40,00%

Tabel 2.2:
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang
Triwulan I Tahun 2025

ode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW I Tahun 2025		
						Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1				2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
7				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1			KECAMATAN					1.959.312.721	1.861.481.553	95,01%
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Sale	75,01	51,55	68,72%	1.825.225.221	115.716.721	6,34%
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95%	61,10%	61,10%	0,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1	50%	0,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1	33%	0,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100%	0,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	75%	75%	1.920.117.000	98.098.821	5,11%
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100%	1.850.157.000	92.908.821	5,02%
7	1	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	1	25%	69.960.000	5.190.000	7,42%
7	1	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang disusun tepat waktu	1	1	100%	0,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%	2,80%	2,80%	0,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	% Dokumen Pendataan Kepegawaian yang dikelola dengan baik	17	2,80%	2,80%	0,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	95	2,80%	2,80%	43.462.000	8.658.594	19,92%
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0,00%	3.246.000	0,00	0,00%
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0	0,00%	3.319.000	3.056.900	92,10%
7	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	0,00%	10.000.000	3.250.000	32,50%
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	0,00%	5.487.500	11.694	0,21%
7	1	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Pemenuhan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	0,00%	9.129.500	175.000	1,92%
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	2	17,00%	12.280.000	2.165.000	17,63%
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	0%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	33,00%	33,00%	26.475.000	8.959.306	33,84%
7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	25,00%	12.0000.000	1.484.306	1,24%
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	3	75,00%	14.475.000	7.475.000	51,64%
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	95%	24,00%	24,00%	12.857.000	0,00	0,00%
7	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PaiaK Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	17	8	47.00%	10.097.000	0,00	0,00%

ode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW I Tahun 2025				
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Keuangan (%)		
1	2			4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100		
				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	0	0,00%	2.760.000	0,00	0,00%	
7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke camat	95%	0%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	95%	0%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
				Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	95%	0%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	0	0	0,00	0,00	0,00%
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	95%	98%	63,00%	131.710.100	118,310,100	89,83%	
					Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp 20.000.000,-							
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu, Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	95%	63,00%	63,00%	131.710.100	118,310,100	89,83%	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	63,00%	21.710.100	16,960,100	78,12%
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	2	25,00%	110.000.000	101,350,000	92,14%
7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		95%	0,00%	0,00%	0,00			
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	% lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	15 Desa	0	0	0,00		
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	95%	33,00%	33,00%	30.138.000	5,000,000	16,59%	
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95%	33,00%	33,00%	30.138.000	5,000,000	16,59%	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	1	33,00%	30.138.000	5,000,000	16,59%
7	1	4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	% Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	95%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	% Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	1	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95%	0,00%	0,00%	9.956.000	0,00	0,00%	
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%	0,00%	0,00%	9.956.000	0,00	0,00%	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	0	0,00%	9.956.000	0,00	0,00%
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	20,00%	20,00%	0,00	0,00	0,00%	

ode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TW I Tahun 2025		
			Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
7162.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	95%	20,00%	20,00%	0,00	0,00	0,00%
7162.012	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15	3	20,00%	0,00	0,00	0,00%
7162.016	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15	3	20,00%	0,00	0,00	0,00%
7162.017	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	% Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	15	3	20,00%	0,00	0,00	0,00%
7162.018	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	% Pemenuhan jabatan Kades dan Perangkat Desa	15	3	20,00%	0,00	0,00	0,00%

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Sale di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sale berupa:

1. Capaian kinerja program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah nihil.

A. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Sale sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Capaian indikator kinerja Nilai SKM Kecamatan Sale pada tahun 2023 sebesar 95,75%, capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 86,00%. Ketercapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

1. Nilai SAKIP

Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kecamatan Sale sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 yaitu Nilai SAKIP.

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Sale pada tahun 2024 adalah 51,55 atau CC.

2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (*excellent service*) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dalam rangka menjaga pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, diperlukan penilaian terhadap instansi pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) serta pemerintah daerah yang selama ini telah dilakukan oleh Kemen PAN RB. Kementerian PAN-RB melaksanakan penilaian dalam bentuk Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Berdasarkan Permenpan RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek

Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Kecamatan Sale sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Capaian indikator kinerja IPP Kecamatan Sale pada tahun 2023 sebesar 3,51%, capaian ini belum melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 4,51%. Ketidaktercapaian kinerja ini diperlukan *review* terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan guna mendukung kinerja dimaksud.

Guna mengetahui gambaran kinerja perangkat daerah Kecamatan Sale secara keseluruhan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3:
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang

No	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pelayanan Publik / IPP		3.1	3.2	3.3		3.1	3.2	3.3	
2	IKM Kecamatan Sale		85	85	86		86	85	86	

B. *Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025.*

Tahun 2025 merupakan tahun strategis dalam kerangka pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang, karena menjadi tahun keempat

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 sekaligus tahun awal implementasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024 yang dilantik pada 20 Februari 2025. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025 menjadi penting sebagai bentuk penyesuaian atas kebijakan dan arah pembangunan baru yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan ini berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025, serta mengakomodir arahan kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah, kebijakan Asta Cita Presiden serta penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Visi Pembangunan Daerah yang diusung dalam periode kepemimpinan baru adalah "Mewujudkan Rembang Sejahtera", yang menjadi orientasi Utama dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Visi ini memiliki keterkaitan kuat dengan arah jangka panjang sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2045, yakni “Rembang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

Renja Perubahan Kecamatan Sale Tahun 2025 dirancang untuk mendukung secara langsung lima misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, berbasis potensi unggulan, serta mampu mengurangi kemiskinan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan serta mendukung ketahanan daerah.

Sejalan dengan misi tersebut, Kecamatan Sale menitikberatkan program dan kegiatan pada upaya penguatan evidence-based planning, perumusan kebijakan pembangunan daerah yang adaptif terhadap isu strategis, dan

peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang terukur dan responsif. Hal ini mencakup penyusunan dokumen perencanaan tahunan, penguatan sistem informasi perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan, fasilitasi sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan wilayah, serta pengembangan riset dan inovasi pembangunan daerah. Renja Perubahan ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Perubahan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
3. Tersedianya infrastruktur dan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Rembang

Kode					Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025				Hasil Analisa Kebutuhan			
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	5	9	3	4	5	9
					KECAMATAN SALE			2,033,572,000	KECAMATAN SALE			2,033,572,000
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2,033,572,000	UNSUR KEWILAYAHAN			2,033,572,000
7	01				KECAMATAN			2,243,526,100	KECAMATAN			2,243,526,100
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec, Sale	75,05 Angka	2,081,517,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec, Sale	75,05 Angka	2,081,517,000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	-	1,975,228,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	-	1,975,228,000
7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1,905,268,000.00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		#####
7	01	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		69,960,000.00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		69,960,000.00
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	-	39,339,800.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	-	39,339,800.00
7	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3,386,000.00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3,386,000.00
7	01	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3,319,000.00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3,319,000.00

Kode					Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025				Hasil Analisa Kebutuhan			
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	5	9	3	4	5	9
7	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11,250,000.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11,250,000.00
7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5,815,400.00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5,815,400.00
7	01	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material				Penyediaan Bahan/Material			
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		9,379,400.00		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		9,379,400.00
7	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6,190,000.00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6,190,000.00
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8,000,000.00
7	01	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah peralatan Laptop Operasional yang disediakan		8,000,000.00		Jumlah peralatan Laptop Operasional yang disediakan		8,000,000.00
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	44,515,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	44,515,000.00
7	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-
7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		10,200,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,		10,200,000.00

Kode					Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025				Hasil Analisa Kebutuhan			
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	5	9	3	4	5	9
						Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
7	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		34,315,000.00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		34,315,000.00
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	-	14,434,200.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	-	14,434,200.00
7	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11,064,200.00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11,064,200.00
7	01	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3,370,000.00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3,370,000.00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp, 20,000,000,-	17 %	125,060,100.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp, 20,000,000,-	17 %	125,060,100.00
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu, Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	-	125,060,100.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu, Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	-	125,060,100.00
7	01	03	2,01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			

Kode					Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025				Hasil Analisa Kebutuhan			
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	5	9	3	4	5	9
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		16,960,100.00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		16,960,100.00
7	01	03	2,01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		108,100,000.00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		108,100,000.00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	28,488,000.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	28,488,000.00
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	-	28,488,000.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	-	28,488,000.00
7	01	04	2,01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		28,488,000.00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		28,488,000.00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan	100 %	8,461,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan	100 %	8,461,000.00

Kode					Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025				Hasil Analisa Kebutuhan			
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	5	9	3	4	5	9
						pemerintahan umum				pemerintahan umum		
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	8,461,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	8,461,000.00
7	01	05	2,01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		8,461,000.00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		8,461,000.00
J U M L A H								2,033,572,000,00				2,033,572,000,00

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SALE

A. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mencermati Isu-isu Strategis Tahun 2025, maka tujuan dari Penyusunan Renja Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah :

1. Menterjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sale yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
2. Menetapkan dan Kegiatan prioritas dan beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Kecamatan Kaliori yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Kaliori untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan
5. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program, Kecamatan Sale yang pada capaian tujuan Pembangunan baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Kaliori Tahun 2025 ini adalah dalam rangka :

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib Waktu dan tepat mutu, dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, sebagaimana Tabel 3.1, berikut:

Tabel 3.1:
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sale
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
					2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik / IPP	Angka	3.1	3.2	3.3	3.1	3.2	3.3	3.5	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM Kecamatan Sale	Angka	85	85	86	86	85	86	86	

B. Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025

Program dan Kegiatan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan Pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2021 -2026. Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Sale Tahun 2025 direncanakan berdasarkan Analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025. Adapun rumusan perubahan rencana program dan pendanaan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025 dirinci pada Tabel 3.2, berikut :

Tabel 3.2:
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sale

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						KECAMATAN SALE							2.033.572.000	2.174.715.100	2.243.526.100						2.984.963.000			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.033.572.000	2.174.715.100	2.243.526.100						2.984.963.000			
	7	01				KECAMATAN							2.033.572.000	2.174.715.100	2.243.526.100						2.984.963.000			
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Sale				75,05 Angka	75,05 Angka	1.983.379.900	2.002.911.000	2.081.517.000							2.879.963.000		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	-			95 %	95 %	1.852.383.000	1.920.117.000	1.920.117.000			-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	-		2.667.423.000	KEC. SALE	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.782.423.000	1.850.157.000	1.905.268.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			2.582.423.000	KEC. SALE	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	69.960.000	69.960.000	69.960.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000	KEC. SALE	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	-			95 %	95 %	50.832.900	43.462.000	43.462.000			-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	-		81.000.000	KEC. SALE	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.248.000	3.246.000	3.386.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000	KEC. SALE	
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.066.000	3.319.000	3.319.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			7.500.000	KEC. SALE
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.591.100	10.000.000	11.250.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			12.500.000	KEC. SALE
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.815.500	5.487.500	5.815.400	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000	KEC. SALE
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.752.300	9.129.500	9.379.400	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			12.500.000	KEC. SALE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6 Laporan	22.360.000	12.280.000	6.190.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			28.000.000	KEC. SALE
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			-	1 Unit	0,00	0,00	0,00			-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	ASN di Kecamatan Sale		16.000.000	KEC. SALE
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	8.000.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			16.000.000	KEC. SALE
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-			95 %	95 %	65.580.000	26.475.000	26.475.000			-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	-		86.040.000	KEC. SALE
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000	KEC. SALE
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber				3 Laporan	3 Laporan	13.200.000	12.000.000	10.200.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata			18.600.000	KEC. SALE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Daya Air dan Listrik yang Disediakan												Kelola Pemerintahan							
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	2 Laporan	51.180.000	14.475.000	34.315.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			66.240.000	KEC. SALE			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	-			95 %	95 %	14.584.000	12.857.000	12.857.000			-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	-		29.500.000	KEC. SALE			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	11.209.000	10.097.000	11.064.200	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			17.000.000	KEC. SALE			
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	5 Unit	3.375.000	2.760.000	3.370.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			12.500.000	KEC. SALE			
2	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-				17 %	17 %	15.684.700	131.710.100	125.060.100							40.000.000				
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu, Prosentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	-			95 %	95 %	15.684.700	131.710.100	131.710.100			-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000	KEC. SALE			
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.315.000	21.710.100	16.960.100	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000	KEC. SALE			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	7.369.700	110.000.000	108.100.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000	KEC. SALE			
3	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	-			100 %	100 %	26.892.000	30.138.000	28.488.000							30.000.000				
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelesaian	Persentase Penyelesaian	-			95 %	95 %	26.892.000	30.138.000	30.138.000			-	1. Pemantapan	-		30.000.000	KEC. SALE			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Keterteraman dan Keterlibatan Umum	permasalahan Keterteraman dan Keterlibatan umum											Kualitas Tata Kelola Pemerintahan					
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	26.892.000	30.138.000	28.488.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000	KEC. SALE
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	7.615.400	9.956.000	8.461.000							35.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	7.615.400	9.956.000	9.956.000			-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000	KEC. SALE
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				71 Orang	71 Orang	7.615.400	9.956.000	8.461.000	Kec. Sale	PAD	-	1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000	KEC. SALE
	J U M L A H										2.033.572.000	2.174.715.100	2.243.526.100						2.984.963.000				

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya.

Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Sale Kabupaten Rembang didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025 antara lain :

- a. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Rembang;

- b. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sale ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Sale;

- c. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sale ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan Renja Kecamatan Sale ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025;

b. Dalam penyusunan RDPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Rembang.

3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kabupaten Rembang Tahun 2025 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2025. Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini diharapkan Perubahan Renja Kecamatan Sale Tahun 2025 dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2025.

Rembang, 21 Juli 2025
Camat Sale

MOH. IMRON, S.H
NIP 19750905 199603 1 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

Kunci sukses untuk mencapai tujuan adalah perencanaan yang baik. Perencanaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Kecamatan Sale sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Sale Tahun 2021-2026 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Disamping itu, sesuai Permenpan RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi

Terkait dengan anggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, penyerapan anggaran adalah salah satu indikator dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilakukan suatu pemerintahan.